

**ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN, KESEHATAN, INVESTASI
PEMERINTAH, DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP PDRB PROVINSI
DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh

FAJARANDA GUSRIAL

2013 / 1307169

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2018

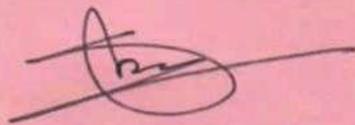
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta
Terhadap PDRB Provinsi di Indonesia**

Nama : Fajaranda Gusrial
BP/NIM : 1307169
Keahlian : Ekonomi Perencanaan Pembangunan
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Disetujui oleh :

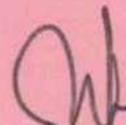
Pembimbing I



Prof. Dr. Syamsul Amar B,MS

NIP. 19571021 198603 1 001

Pembimbing II



Mike Triani SE, MM

NIP. 19840129 200912 2 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Drs. Alianis MS

NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

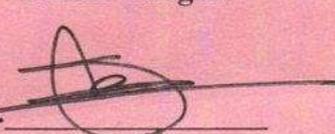
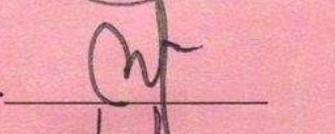
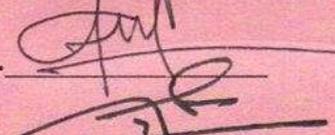
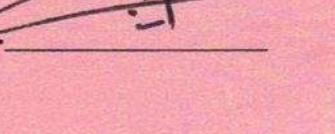
**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta
Terhadap PDRB Provinsi di Indonesia**

Nama : Fajaranda Gusrial
BP/NIM : 1307169
Keahlian : Ekonomi Perencanaan Pembangunan
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Padang, 8 Agustus 2018

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Prof. Dr. Syamsul Amar B,MS	1. 
2.	Sekretaris	Mike Triani, SE, MM	2. 
3.	Anggota	Ariusni SE, M.Si	3. 
4.	Anggota	Drs. Zul Azhar, SE, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajaranda Gusrial
Nim/ Tahun Masuk : 1307169/2013
Tempat/ Tanggal Lahir : Batusangkar, 12 Februari 1995
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln.Palembang no8, asratek, ulak karang
No. HP/telp. : 081277787611
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta Terhadap PDRB Provinsi di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Juli 2018

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
2B3DAFF000294331
6000
ENAM RIBU RUPIAH
FAJARANDA GUSRIAL
NIM 1307169/2013

ABSTRAK

Fajaranda Gusrial (2013/1307169): Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Investasi pemerintah, Investasi swasta Terhadap PDRB Provinsi Di Indonesia, Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, dengan dosen pembimbing (1) Bapak Prof.Dr.Syamsul Amar B,MS dan dosen pembimbing (2) Ibu Mike Triani, SE, MM.

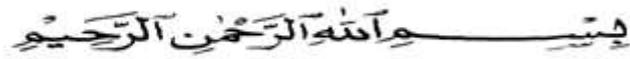
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh (1) pendidikan (2) kesehatan, (3) investasi pemerintah, (4) investasi swasta terhadap PDRB Provinsi di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan induktif yaitu penelitian yang mendeskripsikan variabel penelitian dan menemukan ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data panel dari tahun 2011-2015 per provinsi di Indonesia. Analisis data yang digunakan adalah model regresi panel.

Hasil estimasi memperlihatkan bahwa (1) Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi di Indonesia. (2) Investasi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi di Indonesia, (3) Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi di Indonesia, (4) Secara bersama-sama pendidikan, investasi pemerintah, investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi di Indonesia di Indonesia pada $\alpha = 5\%$.

Dengan demikian disarankan kepada pemerintah untuk (1) meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas dengan cara meningkatkan fasilitas pendidikan terutama di daerah pedesaan yang tingkat pendidikannya masih rendah. (2) Meningkatkan kegiatan investasi pemerintah terutama pelayanan publik seperti pengadaan infrastruktur jalan, jaringan, kesehatan dan transportasi agar dapat mendorong kelancaran usaha. (3) Pemerintah harus memperhatikan persoalan umum berupa keamanan dan kepastian hukum dalam negeri.

Kata Kunci: PDRB , Pendidikan, Kesehatan, Investasi, Regersi Panel.

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta Terhadap PDRB Provinsi di Indonesia**” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 pada jurusan ilmu ekonomi universitas negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Prof.Dr. Syamsul Amar B, MS selaku pembimbing I dan Ibu Mike Triani, SE, MM selaku pembimbing II yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. H. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku

Sekretaris jurusan Ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Drs.Zul Azhar , M.Si dan Ibu Arihusni, SE, M.Si selaku penguji skripsi yang telah memberikan saran-saran serta tanggapan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, organisasi, dan bantuan moril dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bapak, Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Ibunda saya yaitu Yenni Marlis, S.Pt yang selalu menyediakan waktu, memberikan motivasi dan doa serta pengorbanan baik dari segi moril dan materi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Kakak saya Annisa Rianda Gusrial, S.Pd yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2013 tanpa terkecuali.

10. Kepada para penghuni “Rumah Kita” yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu membantu dan memberi dorongan semangat serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Dini Fadillah, A.Md yang telah memberikan semangat, motivasi kepada penulis.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Amin. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, Juli 2018

Penulis,

Fajaranda Gusrial

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTARLAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. KAJIAN TEORI	16
1. Teori Pendapatan Domestik Regional Bruto.....	16
2. Pengeluaran Bidang Pendidikan.....	20
3. Pengeluaran Bidang Kesehatan.....	24
4. Investasi.....	26
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Konseptual	35
D. Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Defenisi Operasional Variabel.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	43
1. Analisis Deskriptif	43

2. Analisis Induktif	43
a. Model Regresi Panel (<i>Pooled Analysis</i>).....	43
b. Uji Pemilihan Model.....	44
1) Uji Chow	45
2) Uji Hausman.....	46
c. Uji Asumsi Klasik	46
1) Uji Heterokedastisitas	46
2) Uji Multikolonearitas	47
d. Uji Kecocokan Model (<i>Goodness of fit</i>).....	48
e. Koefisien determinasi (R^2)	48
f. Uji Hipotesis	49
1) Uji t.....	49
2) Uji f.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian.....	51
1. Gambaran Umum wilayah penelitian.....	51
B. Deskripsi Variabel Penelitian	59
C. Analisis Induktif.....	74
1. Uji Pemilihan Model.....	74
a) Uji Chow.....	74
b) Uji Hausman	75
2. Uji Asumsi Klasik	76
a) Uji Heterokedastisitas	76
b) Uji Multikolonearitas.....	78
3. Hasil Estimasi Model Regresi Panel.....	79
4. Uji Kecocokan Model (<i>Goodness of fit</i>)	81
5. Koefisien determinasi (R^2)	81
6. Uji hipotesis.....	82
a) Estimasi Uji t.....	82
b) Uji f.....	84

D. PEMBAHASAN	
1. Pengaruh tingkat pendidikan PDRB Provinsi di Indonesia	84
2. Pengaruh investasi pemerintah terhadap PDRB Provinsi di Indonesia.....	86
3. Pengaruh investasi swasta terhadap PDRB Provinsi di Indonesia .	88
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. SIMPULAN	90
B. SARAN.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Regional Dosmetik Bruto Indonesia Periode 2012-2015	2
Tabel 1.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Provinsi di Indonesia	4
Tabel 1.3 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Provinsi di Indonesia	6
Tabel 1.4 Perkembangan Investasi Pemerintah Provinsi di Indonesia	8
Tabel 1.5 Perkembangan Investasi Swasta Provinsi di Indonesia	11
Tabel 4.1 Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indosia Usia 15 Keatas Periode 2011-2015	52
Tabel 4.2 Data PDB Indonesia dari Tahun 2006-2015	55
Tabel 4.3 Perkembangan dan laju Pertumbuhan PDB Sektoral di Indonesia Tahun 2011-2015.	57
Tabel 4.4 Data PDRB Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2015	59
Tabel 4.5 Data Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Tahun 2013-2015	63
Tabel 4.6 Data Pengeluran Pemerintah Bidang Kesehatan Tahun 2013-2015	66
Tabel 4.7 Data Investasi Pemerintah 2013-2016	69
Tabel 4.8 Data Investasi Swasta 2013-2016	72
Tabel 4.9 Tabel Uji Chow	75
Tabel 4.10 Tabel Uji Hausman	76
Tabel 4.11 Tabel Uji Heterokedastisitas	77
Tabel 4.12 Tabel Uji Multikoloniaritas 1	78
Tabel 4.13 Tabel Uji Multikoloniaritas 2	79
Tabel 4.14 Tabel Regresi Panel <i>Fixed Effect Model</i>	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Perpotongan Keynesian, Pergeseran ke atas dalam Pengeluaran Pemerintah yang Direncanakan.....	18
Gambar 2.2 Kurva Keseimbangan Investasi dan Depresiasi	28
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data PDRB Provinsi di Indonesia periode 2011-2015	95
2. Data pengeluaran pemerintah bidang pendidikan Provinsi di Indonesia periode 2011-2015.....	96
3. Data pengeluaran pemerintah bidang kesehatan Provinsi di Indonesia periode 2011-2015.....	97
4. Data investasi pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2011-2015.....	98
5. Data investasi swasta Provinsi di Indonesia periode 2011-2015	99
6. Hasil Uji Pemilihan Model	
a. Uji Chow	100
b. Uji Hausman	100
7. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu syarat yang sangat penting untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan juga dipandang sebagai syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, yang diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto. Dalam konteks ekonomi, pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah. Terjadinya fluktuasi pada PDRB mengindikasikan terjadinya fluktuasi dalam proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Dimana kenaikan PDRB menunjukkan kegairahan ekonomi suatu daerah karena ekonomi di daerah tersebut telah berekspansi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Tabel 1.1
Pendapatan Regional Domestik Bruto Indonesia Periode 2013-2015

PROVINSI	Miliar Rupiah			(%)	
	2013	2014	2015	2014	2015
Aceh	111,755.8	113,487.8	112,672.4	1.5	-0.7
Sumatera Utara	398,727.1	419,573.3	440,955.9	5.2	5.1
Sumatera Barat	125,940.6	133,316.1	140,529.2	5.9	5.4
Riau	436,187.5	447,951.6	448,936.6	2.7	0.2
Kepulauan Riau	137,263.9	146,355.6	155,162.6	6.6	6.0
Jambi	111,766.1	119,984.7	125,038.7	7.4	4.2
Sumatera Selatan	232,175.1	243,093.8	254,022.9	4.7	4.5
K. Bangka Belitung	42,190.9	44,159.4	45,961.5	4.7	4.1
Bengkulu	34,326.4	36,206.7	38,067.5	5.5	5.1
Lampung	180,620.0	189,790.0	199,525.4	5.1	5.1
DKI Jakarta	1,296,694.6	1,373,389.6	1,454,102.1	5.9	5.9
Jawa Barat	1,093,543.6	1,149,231.4	1,207,001.5	5.1	5.0
Banten	331,099.1	349,205.7	367,959.2	5.5	5.4
Jawa Tengah	726,655.1	764,992.7	806,609.0	5.3	5.4
DI Yogyakarta	75,627.5	79,532.3	83,461.6	5.2	4.9
Jawa Timur	1,192,789.8	1,262,697.1	1,331,418.2	5.9	5.4
Bali	114,103.6	121,779.1	129,137.9	6.7	6.0
NTB	69,766.7	73,298.1	88,866.8	5.1	21.2
NTT	51,505.2	54,106.3	56,820.1	5.1	5.0
Kalimantan Barat	101,980.3	107,113.8	112,261.2	5.0	4.8
Kalimantan Tengah	69,411.0	73,724.9	78,890.0	6.2	7.0
Kalimantan Selatan	101,850.5	106,791.3	110,890.7	4.9	3.8
Kalimantan timur	438,532.9	445,418.6	439,716.1	1.6	-1.3
Sulawesi Utara	62,422.5	66,359.4	70,418.8	6.3	6.1
Gorontalo	19,367.6	20,775.7	22,070.5	7.3	6.2
Sulawesi Tengah	68,219.3	71,676.1	82,829.2	5.1	15.6
Sulawesi Selatan	217,589.1	233,998.7	250,729.6	7.5	7.1
Sulawesi Barat	22,227.4	24,200.1	25,983.4	8.9	7.4
Sulawesi Tenggara	64,268.7	68,290.6	72,988.3	6.3	6.9
Maluku Utara	18,208.7	19,206.3	20,377.5	5.5	6.1
Papua	117,118.8	121,580.1	131,270.9	3.8	8.0
Papua Barat	47,694.2	50,287.0	52,347.4	5.4	4.1

Sumber : Badan Pusat Statistik (tahun 2013-2016)

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat Pendapatan domestik regional bruto provinsi-provinsi di Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami tren yang positif. Pada tahun 2015 ada beberapa provinsi yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan seperti NTB dan Sulawesi Tengah masing-masing sebesar 21.2% dan 15.6%.

PDRB NTB pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang signifikan dikarenakan adanya aktivitas ekspor hasil tambang PT NNT hingga Maret 2015. Selain itu faktor investasi juga berkontribusi besar dalam kenaikan PDRB NTB pada tahun 2015 berupa pembangunan sejumlah proyek besar seperti pelabuhan Gili Mas, dan juga pembangunan proyek bendungan.

PDRB Sulawesi Tengah pada tahun 2015 juga mengalami pertumbuhan yang signifikan karena pada tahun 2013 Sulawesi Tengah membangun kawasan industri di daerah Morowali.

Pada tahun 2015 PDRB Aceh mengalami penurunan yang sangat drastis, hal ini dikarenakan berhentinya operasi kilang gas cair PT Arun LNG, sehingga berdampak signifikan kepada nilai ekspor migas Aceh yang dulu jadi salah satu penopang kuat Ekonomi Aceh.

PDRB salah satunya di pengaruhi oleh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Sektor pendidikan memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro,2006:182).

Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan investasi tidak langsung yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan modal manusia. Bahkan beberapa ekonom terdahulu menekankan pentingnya modal manusia ke dalam produksi. Pengetahuan dan ketrampilan teknologi merupakan peralatan immaterial dimana tanpa keduanya modal fisik manusia tidak dimanfaatkan secara produktif. Semakin besar pengeluaran pemerintah

di sektor pendidikan akan meningkatkan modal manusia yang nantinya akan meningkatkan produktifitas sehingga PDB Indonesia juga meningkat.

Tabel 1.2
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan
Provinsi-Provinsi di Indonesia Periode 2013-2015

Provinsi	Milyar			(%)	
	2013	2014	2015	2014	2015
Aceh	738	1,374	1,228	0.9	-0.1
Sumatera Utara	273	330	330	0.2	0.0
Sumatera Barat	152	159	169	0.0	0.1
Riau	743	645	987	-0.1	0.5
Kepulauan Riau	376	320	374	-0.1	0.2
Jambi	244	283	314	0.2	0.1
Sumatera Selatan	337	371	256	0.1	-0.3
Bangka Belitung	69	85	105	0.2	0.2
Bengkulu	159	180	198	0.1	0.1
Lampung	339	331	337	0.0	0.0
DKI Jakarta	12,815	15,051	17,401	0.2	0.2
Jawa Barat	832	685	900	-0.2	0.3
Banten	301	342	395	0.1	0.2
Jawa Tengah	319	324	389	0.0	0.2
D.I. Yogyakarta	251	327	352	0.3	0.1
Jawa Timur	515	531	544	0.0	0.0
Bali	238	244	447	0.0	0.8
NTB	45	62	64	0.4	0.0
NTT	87	65	79	-0.3	0.2
Kalimantan Barat	129	160	178	0.2	0.1
Kalimantan Tengah	215	333	319	0.5	0.0
Kalimantan Selatan	390	460	476	0.2	0.0
Kalimantan Timur	804	905	443	0.1	-0.5
Sulawesi Utara	116	111	116	0.0	0.0
Gorontalo	118	93	109	-0.2	0.2
Sulawesi Tengah	136	140	157	0.0	0.1
Sulawesi Selatan	119	228	235	0.9	0.0
Sulawesi Barat	49	61	65	0.2	0.1
Sulawesi Tenggara	88	109	101	0.2	-0.1
Maluku Utara	45	53	116	0.2	1.2
Papua	218	155	391	-0.3	1.5
Papua Barat	135	244	130	0.8	-0.5

Sumber :Direktorat Jendral Perimbangan Pajak tahun (2013-2016)

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat perkembangan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dari tahun 2013-2015 berfluktuasi. Pengeluaran pemerintah

pendidikan paling tinggi adalah provinsi DKI Jakarta, karena PDRB Provinsi DKI Jakarta merupakan PDRB Provinsi tertinggi di Indonesia dan hal ini membuat Provinsi DKI Jakarta mampu untuk memberikan dana yang berlebih untuk mengembangkan fasilitas dibidang pendidikan. Tingginya tingkat pengeluaran pendidikan ini juga diikuti oleh kenaikan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta, tetapi laju pertumbuhannya tetap hal ini sesuai dengan teori. Namun pada provinsi Bali pada tahun 2015 mengalami kenaikan pengeluaran pemerintah yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,8% namun hal ini menjadi fenomena karena pada tahun tersebut pendapatan domestik regional bruto provinsi Bali justru mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6%.

Sumber daya manusia yang mempunyai kualitas tinggi akan meningkatkan output dan pendapatan nasional. Peningkatan kualitas pendidikan memberikan banyak manfaat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu manajemen perusahaan yang dikembangkan akan semakin efisien, penguasaan terhadap pengembangan IPTEK, peningkatan produktivitas dan peningkatan daya pikir masyarakat.

Selain tingkat pendidikan, PDRB juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan investasi tidak langsung yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan modal manusia. Semakin baik pemerintah mengoptimalkan anggaran kesehatan tersebut, semakin baik tingkat kesehatan masyarakatnya secara nasionalnya. Dan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat,

hal ini dapat dicapai dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang semakin baik tingkat kesehatan masyarakat, semakin baik fisik mereka dalam berproduktif.

Tabel 1.3
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan
Provinsi-Provinsi di Indonesia Periode 2013-2015

Provinsi	Milyar			(%)	
	2013	2014	2015	2014	2015
Aceh	887	1,090	1,117	23.0	2.5
Sumatera Utara	298	402	399	34.8	-0.8
Sumatera Barat	354	439	492	23.9	11.9
Riau	540	561	774	3.9	38.0
Kepulauan Riau	126	238	292	89.3	22.5
Jambi	252	353	338	39.8	-4.3
Sumatera Selatan	177	270	366	52.3	35.8
Bangka Belitung	86	132	86	53.2	-34.6
Bengkulu	219	226	308	3.1	36.0
Lampung	391	394	395	0.7	0.2
DKI Jakarta	4,634	5,583	6,617	20.5	18.5
Jawa Barat	444	573	993	29.1	73.3
Banten	383	396	364	3.3	-8.0
Jawa Tengah	1,249	1,625	1,932	30.1	18.9
D.I. Yogyakarta	169	160	201	-5.4	25.7
Jawa Timur	2,070	2,257	2,958	9.0	31.1
Bali	677	961	1,023	41.9	6.4
NTB	227	393	380	73.0	-3.3
NTT	170	199	279	16.8	40.2
Kalimantan Barat	298	324	359	8.6	10.9
Kalimantan Tengah	189	210	233	11.0	10.9
Kalimantan Selatan	689	1,021	941	48.2	-7.8
Kalimantan Timur	1,156	966	848	-16.4	-12.2
Sulawesi Utara	123	177	200	44.3	13.1
Gorontalo	55	130	153	137.4	18.3
Sulawesi Tengah	179	204	237	13.6	16.4
Sulawesi Selatan	341	396	439	16.2	11.0
Sulawesi Barat	50	78	87	54.0	12.4
Sulawesi Tenggara	136	42	190	-68.8	346.5
Maluku Utara	94	118	156	25.0	31.9
Papua	673	650	767	-3.4	18.0
Papua Barat	83	173	206	108.2	19.4

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Pajak tahun (2013-2016)

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat perkembangan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dari tahun 2013-2015 berfluktuasi. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan paling tinggi adalah provinsi DKI Jakarta. Pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan Provinsi DKI Jakarta tiap tahun nya mengalami kenaikan namun laju pertumbuhannya mengalami perubahan yaitu sebesar 20,5% pada tahun 2014 menjadi 18,5 % pada tahun 2015. Tingginya tingkat pengeluaran kesehatan ini juga diikuti oleh kenaikan Produk Domestik Regional Bruto hal ini sesuai dengan teori, kemudian pada provinsi Bali tahun 2015 mengalami penurunan laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 41,9 % pada tahun 2014 menjadi 6,4% pada tahun 2015 yang mengakibatkan pada saat itu pendapatan domestik regional bruto provinsi Bali mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6% hal ini sesuai dengan teori.

Pada tahun 2015, Provinsi Jambi mengalami penurunan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan yang cukup signifikan, dari 39,8% tahun 2014 menjadi -4,3% di tahun 2015. Ini dikarenakan pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jambi lebih mengutamakan menaikkan kualitas tingkat pendidikan supaya pendidikan mereka bisa meningkat ke arah yang lebih baik.

Selain pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, pendapatan domestik regional bruto juga dipengaruhi oleh tingkat investasi. Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran. Dengan demikian, terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut akan menambah output nasional sehingga akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Sukirno,2000:71).

Tabel 1.4
Perkembangan Investasi Pemerintah Provinsi-Provinsi di Indonesia

Provinsi	Milyah			(%)	
	2013	2014	2015	2014	2015
Aceh	1,120	1,205	1,215	7.6	0.9
Sumatera Utara	726	781	796	7.5	1.9
Sumatera Barat	311	348	402	11.9	15.4
Riau	753	560	776	-25.6	38.5
Kepulauan Riau	272	331	261	21.9	-21.3
Jambi	301	321	343	6.5	6.9
Sumatera Selatan	568	578	519	1.7	-10.2
Bangka Belitung	161	160	187	-0.9	17.2
Bengkulu	173	194	228	12.0	17.9
Lampung	388	445	478	14.7	7.3
DKI Jakarta	3,830	3,771	4,303	-1.5	14.1
Jawa Barat	1,840	2,020	2,442	9.8	20.9
Banten	530	619	808	16.9	30.6
Jawa Tengah	1,273	1,509	1,782	18.6	18.1
D.I. Yogyakarta	251	298	350	18.8	17.3
Jawa Timur	1,674	2,001	2,295	19.5	14.7
Bali	387	449	500	16.1	11.3
NTB	238	261	337	9.9	28.7
NTT	238	269	333	13.1	23.6
Kalimantan Barat	304	365	412	20.0	12.9
Kalimantan Tengah	293	324	348	10.5	7.6
Kalimantan Selatan	475	492	510	3.5	3.8
Kalimantan Timur	1,378	1,127	860	-18.2	-23.7
Sulawesi Utara	203	223	269	10.1	20.8
Gorontalo	105	120	141	14.6	16.9
Sulawesi Tengah	215	245	295	14.0	20.7
Sulawesi Selatan	492	560	615	13.7	9.8
Sulawesi Barat	104	123	139	17.5	12.9
Sulawesi Tenggara	181	209	235	15.2	12.4
Maluku Utara	139	148	181	6.8	22.1
Papua	817	1,030	1,240	26.1	20.3
Papua Barat	451	543	688	20.3	26.8

sumber : Badan Pusat Statistik tahun (2013-2016)

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat perkembangan investasi pemerintah dari tahun 2013-2015 berfluktuasi. Perkembangan investasi pemerintah paling tinggi terjadi di provinsi Riau dengan tingkat pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 38,5%. Tingginya tingkat pertumbuhan investasi pemerintah ini tidak diikuti oleh kenaikan Produk Domestik Regional Bruto hal ini tidak sesuai dengan teori kemudian pada provinsi Banten juga mengalami pertumbuhan investasi pemerintah yang tinggi yaitu sebesar 30,6 % pada tahun 2015. Seharusnya peningkatan investasi swasta ini mampu mendorong pendapatan domestik regional bruto provinsi Banten pada saat itu namun yang terjadi pada tahun 2015 pertumbuhan PDRB provinsi Banten justru mengalami penurunan yaitu sebesar 0,1% dari tahun 2014-2015 walaupun angka ini tidak cukup besar namun tetap menjadi fenomena karena tidak sesuai dengan teori.

Selain meningkatnya pertumbuhan investasi pemerintah pada beberapa provinsi di Indonesia, penurunan pertumbuhan juga terjadi seperti pada provinsi Kepri dan Kalimantan Timur yang mengalami penurunan masing-masing sebesar -21,3% dan -23,7%. Penurunan pertumbuhan investasi pemerintah ini diikuti oleh penurunan pendapatan domestik regional bruto kedua provinsi tersebut, hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa PDRB dipengaruhi positif oleh investasi pemerintah.

Dalam meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan dana yang memadai. Sehingga peran serta investasi mempunyai cakupan yang cukup penting karena sesuai dengan fungsinya sebagai penyokong pembangunan dan

pertumbuhan nasional melalui pos penerimaan negara sedangkan tujuannya adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan ekonomi harus didukung oleh berbagai faktor diantaranya investasi baik itu swasta maupun pemerintah. Pembangunan yang didukung oleh peningkatan investasi akan mendorong keberlanjutan hasil pembangunan (Mankiw, 2007:219). Peningkatan investasi wilayah tidak terlepas dari iklim investasi wilayah. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, tidak terlepas dari peranan Pemerintah Daerah. Banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan pembangunan tidak hanya melalui peranan pemerintah namun juga peranan pihak swasta.

Investasi swasta juga merupakan salah satu faktor penting untuk memicu peningkatan pendapatan suatu daerah. Karena dengan meningkatnya investasi daerah dapat meningkatkan pembangunan daerah. Menurut Rizky (2016) Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri yang disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Tabel 1.5
Perkembangan Investasi Swasta Provinsi-Provinsi di Indonesia

PROVINSI	Miliar			%	
	2013	2014	2015	2014	2015
Aceh	3,636.4	5,110.3	4,192.4	40.5	-18.0
Sumatera Utara	5,068.9	4,223.9	4,287.4	-16.7	1.5
Sumatera Barat	677.8	421.1	1,552.5	-37.9	268.7
Riau	4,874.3	7,707.6	9,943.0	58.1	29.0
Kepulauan Riau	417.7	28.5	612.1	-93.2	2047.7
Jambi	2,799.6	908.0	3,540.2	-67.6	289.9
Sumatera Selatan	3,396.0	7,042.8	10,944.1	107.4	55.4
K.Bangka Belitung	608.2	615.5	1,023.7	1.2	66.3
Bengkulu	109.6	7.8	553.9	-92.9	7001.3
Lampung	1,325.3	3,495.7	1,102.3	163.8	-68.5
DKI Jakarta	5,754.5	17,811.5	15,512.7	209.5	-12.9
Jawa Barat	9,006.1	18,726.9	26,272.9	107.9	40.3
Banten	4,008.7	8,081.3	10,709.9	101.6	32.5
Jawa Tengah	12,593.6	13,601.6	15,410.7	8.0	13.3
DI Yogyakarta	283.8	703.9	362.4	148.0	-48.5
Jawa Timur	34,848.9	38,132.0	35,489.8	9.4	-6.9
Bali	2,984.7	252.8	1,250.4	-91.5	394.6
NTB	1,398.0	212.5	347.8	-84.8	63.7
NTT	17.6	3.6	1,295.7	-79.5	35891.7
Kalimantan Barat	2,522.1	4,320.8	6,143.5	71.3	42.2
Kalimantan Tengah	1,835.3	980.4	1,270.1	-46.6	29.5
Kalimantan Selatan	8,299.2	2,616.5	2,060.4	-68.5	-21.3
Kalimantan timur	16,034.6	12,859.0	9,611.3	-19.8	-25.3
Sulawesi Utara	66.8	83.0	270.6	24.3	226.0
Gorontalo	84.4	45.1	94.3	-46.6	109.1
Sulawesi Tengah	605.3	95.8	968.4	-84.2	910.9
Sulawesi Selatan	921.0	4,949.6	9,215.3	437.4	86.2
Sulawesi Barat	685.1	690.1	1,103.8	0.7	59.9
Sulawesi Tenggara	1,261.6	1,249.9	2,015.4	-0.9	61.2
Maluku	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Maluku Utara	1,114.9	156.3	48.2	-86.0	-69.2
Papua	584.3	249.9	63.4	-57.2	-74.6
Papua Barat	304.0	100.0	1,275.2	-67.1	1175.2

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun (2013-2016)

Dari Tabel 1.5 dapat dilihat perkembangan investasi swasta dari tahun 2013-2015 berfluktuasi. Perkembangan investasi swasta paling tinggi terjadi di provinsi NTT dengan tingkat pertumbuhan pada tahun 2015 mencapai 35891 %. Ini dikarenakan banyak nya investor yang menanamkan modal di

NTT dibidang pariwisata. Karena NTT memiliki alam yang sangat indah, maka hal itu lah yang menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal nya di Provinsi NTT. Seharusnya peningkatan investasi swasta ini mampu mendorong pendapatan domestik regional bruto provinsi NTT pada saat itu namun yang terjadi pada tahun 2015 pertumbuhan PDRB provinsi NTT justru mengalami penurunan yaitu sebesar 5,1% pada tahun 2014 menjadi 5% pada tahun 2015 walaupun angka ini tidak cukup besar namun tetap menjadi fenomena karena tidak sesuai dengan teori.

Selain meningkatnya pertumbuhan investasi swasta pada beberapa provinsi di Indonesia, penurunan pertumbuhan Investasi swasta juga terjadi seperti pada provinsi lampung, maluku utara dan papua yang mengalami penurunan masing-masing sebesar -68,5%, -69,2% dan -74,6%.. Hal ini juga menjadi fenomena karena pendapatan domestik ketiga provinsi tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan.

PDRB di Indonesia dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, investasi pemerintah dan investasi swasta. Berdasarkan data yang ada, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan , kesehatan, investasi pemerintah, investasi swasta cenderung memiliki trend yang positif dimana seharusnya hal tersebut memberikan dampak positif terhadap PDRB Indonesia, namun nyatanya yang terjadi justru sebaliknya laju pertumbuhan PDRB justru memiliki trend yang negatif.

Dari fenomena-fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**“Pengaruh Pendidikan, Kesehatan,**

Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh tingkat pendidikan terhadap produk domestik regional bruto provinsi di Indonesia?
2. Sejauhmana pengaruh tingkat kesehatan terhadap produk domestik regional bruto provinsi di Indonesia?
3. Sejauhmana pengaruh investasi pemerintah terhadap produk domestik regional bruto provinsi di Indonesia?
4. Sejauhmana pengaruh investasi swasta terhadap produk domestik regional bruto provinsi di Indonesia?
5. Sejauhmana pengaruh tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, investasi pemerintah dan investasi swasta secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto provinsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap produk domestik regional bruto provinsi di Indonesia
2. Menganalisis pengaruh tingkat kesehatan terhadap produk domestik regional bruto provinsi di Indonesia

3. Menganalisis pengaruh investasi pemerintah terhadap produk domestik regional bruto provinsi di Indonesia
4. Menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap produk domestik regional bruto provinsi di Indonesia
5. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, investasi pemerintah dan investasi swasta secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto provinsi di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang penelitian ilmiah.
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bagi ilmu pengetahuan

Bagi peneliti lain yang melakukan penelitian pada masalah yang sama diharapkan tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu ekonomi terutama yang berkaitan dengan ekonomi sumber daya manusia serta ilmu mengenai pertumbuhan ekonomi dan PDRB

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta masukan bagi pemerintah pusat selaku pengambil kebijakan supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mengalami perlambatan lagi dengan cara mengamati dan mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti investasi maupun pengeluaran pemerintah baik itu di bidang pendidikan maupun kesehatan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Pendapatan Domestik Regional Bruto

Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan.

Menurut Sukirno (2000;113) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016) jangka panjang.

Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro.

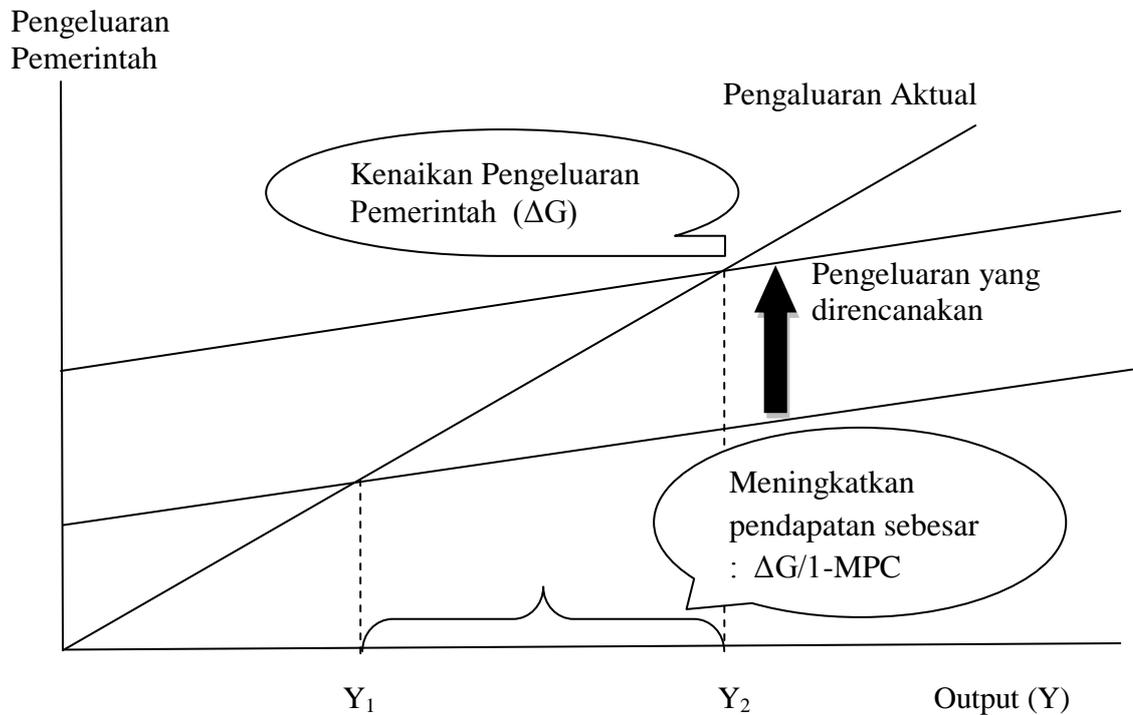
PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Sukirno, 2000;115). Sedangkan menurut BPS (2016) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Kuncoro (2004) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih diartikan sebagai pembangunan yang mana lebih menitikberatkan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten maupun kota. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB.

a. Teori Pendapatan Domestik Regional Bruto dan Belanja Pemerintah Versi Keynes

Teori yang membahas mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi diuraikan panjang lebar dalam *The General Theory Keynes*. Teori ini menguraikan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek, sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Untuk memodelkan pandangan

Keynesian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ini diilustrasikan dengan pemodelan yang disebut perpotongan Keynesian (Mankiw, 2007;61), seperti yang ditunjukkan pada *gambar 1* :



Sumber: Mankiw, 2007

Gambar 2.1. Perpotongan Keynesian, Pergeseran ke atas dalam Pengeluaran Pemerintah yang Direncanakan Sebesar ΔG Meningkatkan Output Sebesar $\Delta G/(1-MPC)$

Besarnya kenaikan output sebagai dampak dari kenaikan pengeluaran pemerintah disebut pengganda pembelian pemerintah (*Government purchases multiplier*) yang diukur dengan rasio $\Delta Y/\Delta G$. Implikasi dari perpotongan Keynesian adalah bahwa kenaikan output (ΔY) lebih besar dari kenaikan pengeluaran pemerintah (ΔG), hal ini disebabkan karena adanya efek berantai yang ditimbulkan dari peningkatan pengeluaran pemerintah. Proses ini bermula dari perubahan awal pengeluaran pemerintah sebesar ΔG meningkatkan output ΔY sebesar ΔG , peningkatan output atau pendapatan ini selanjutnya meningkatkan konsumsi masyarakat sebesar $MPC \times \Delta G$, di mana MPC (*Marginal Propensity to Consume*) adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kenaikan dalam pendapatan yang kedua ini sekali lagi meningkatkan konsumsi sekarang sebesar $MPC \times (MPC \times \Delta G)$ dan seterusnya, sehingga angka pengganda ini merupakan seri geometri tidak terhingga.

Kita asumsikan Pengeluaran Pemerintah pertama itu G_1 . Ketika pengeluaran pemerintah berada pada posisi G_1 maka itu akan menghasilkan pendapatan yang berada di posisi Y_1 . Ketika Pengeluaran dinaikan ke posisi G_2 maka itu akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi, maka pendapatan akan bergeser ke arah titik Y_2 . Dapat disimpulkan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah maka akan semakin besar pula pendapatan yang didapatkan.

Selanjutnya menurut (Loizides, et, al, 2005) menunjukkan bahwa pertumbuhan substansial dari besaran pengeluaran pemerintah baik di negara maju maupun pada negara berkembang ini sejak Perang Dunia II, dan pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang (atau sebaliknya), telah banyak menjadi subyek penelitian. Di sisi lain, studi pembiayaan publik telah diarahkan untuk mengidentifikasi penyebab pertumbuhan sektor publik. Hukum Wagner mengenai pengeluaran publik adalah salah satu usaha paling awal yang menekankan pertumbuhan ekonomi sebagai determinan mendasar dari pertumbuhan sektor publik. Sejumlah studi menemukan hubungan positif yang nyata antara pertumbuhan sektor publik dan pertumbuhan ekonomi hanya untuk negara berkembang tetapi bukan pada negara maju, yang lainnya malahan melaporkan hubungan negatif antara pembe-
lanjutan pemerintah dan *GNP*.

2. Pengeluaran bidang pendidikan

Menurut Todaro (2014: 18) Pendidikan merupakan tujuan pembangunan, pendidikan memainkan peranan utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan juga dapat di lihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan merupakan bentuk investasi sumberdaya manusia yang akan memberikan keuntungan dimasa yang akan datang baik kepada masyarakat maupun kepada negara dimasa yang akan datang, maupun orang-orang yang mengikuti pendidikan itu sendiri. Sebagai salah satu bentuk investasi sumberdaya manusia

Menurut Sadono Sukirno (2006:38) pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat dan pengeluaran pemerintah ini merupakan salah satu aspek penggunaan sumberdaya ekonomi yang secara langsung dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki atau dinikmati oleh masyarakat.

Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan pra-syarat kunci bagi pertumbuhan pembangunan sektor lainnya. Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas telah menjadi tujuan penting dari kebijakan pembangunan. Negara dengan tingkat ketimpangan pendidikan tinggi secara konsisten menunjukkan tingkat inovasi yang lebih rendah, rendahnya tingkat efisiensi produksi, dan kecenderungan untuk mentransmisi kemiskinan lintas generasi (Winarti, 2014: 11).

Pemerintah menempatkan Pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional, hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ini berarti 20% dari pendapatan negara dan pendapatan daerah harus dialokasikan atau digunakan untuk membiayai semua keperluan

di bidang pendidikan supaya mutu pendidikan akan meningkat ke arah yang lebih baik.

Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Winarti, 2014 : 41).

Pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Dan pembentukan modal manusia ini dimulai dari peningkatan pendidikan yang akan dapat meningkatkan kesempatan kerja yang akan dapat meningkatkan produktivitas yang dapat menambah pendapatan. (Jingahn 2012 : 414).

Jadi untuk meningkatkan modal manusia maka sangat diperlukan keahlian serta pendidikan bagi seorang individu untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu

untuk mendapatkan layanan pendidikan yang memadai maka diperlukan campur tangan pemerintah untuk meningkatkan layanan pendidikan yang bisa dilihat dari pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan yang bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana pendidikan masyarakatnya. Dan anggaran pendidikan adalah perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, yang menyangkut pengeluaran atau belanja yang dinyatakan dalam suatu uang dalam jangka waktu tertentu biasanya adalah satu tahun yang diarahkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pokok dinas pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan.

Investasi dalam hal pendidikan sangat dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang layak. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan suatu wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pemerintah pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk secara merata. Dengan tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang memadai dari yang telah dianggarkan oleh pemerintah pada pengeluaran pada bidang pendidikannya, maka harapan pemerintah dapat mengurangi angka penduduk yang tidak bersekolah dan penduduk miskin yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya.

3. Pengeluaran bidang kesehatan

Permasalahan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Winarti, 2014 :41).

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Manusia tidak akan dapat beraktivitas dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Tidak hanya bagi usia dewasa namun juga anak-anak, oleh karena itu sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah.

Rendahnya tingkat kesehatan mengakibatkan rendahnya produktivitas karena banyaknya hari kerja yang hilang karena sakit. Produktivitas yang rendah akan mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan yang diterima oleh seorang individu. Oleh karena itu, tingkat kesehatan yang rendah sangat rentan terhadap peningkatan angka kemiskinan.

Menurut Todaro (2003:404) kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik juga. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan ekonomi

yang vital sebagai input produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan penting dalam pembangunan ekonomi. Implikasi dari penerapan teori *human capital* dibidang perbaikan kesehatan adalah perlunya usaha memerangi kemiskinan.

Mardiasmo (2002:78) menyatakan peranan pemerintah dalam pembangunan kesehatan pada dasarnya bertanggung jawab kepada perbaikan kesehatan masyarakat dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat didistribusikan kepada masyarakat.
- b. Mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- c. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan dan membiayai usaha-usaha kesehatan tanpa melupakan fungsi sosial.
- d. Pengaturan aset-aset pemerintah yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin administrasi pemerintah dan usaha-usaha pembangunan sektor kesehatan.
- e. Pengawasan pelaksanaan tugas-tugas rutin administrasi pemerintah dan usaha-usaha pembangunan di sektor kesehatan yang berada dibawah kebijakan umum yang digariskan presiden dan peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan maka diperlukan dana, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan kesehatan turut serta membantu

penurunan angka kemiskinan, karena manusia yang sehat akan jauh lebih baik daripada manusia yang kurang sehat. Kesehatan yang baik akan berpengaruh pada perubahan yang baik, sebaliknya kesehatan yang buruk atau kurang baik akan berakibat pada perubahan ke arah yang kurang baik juga tentunya, karena tanpa kesehatan masyarakat tidak akan memiliki semangat serta produktivitas.

4. Investasi

a. Teori Investasi

Menurut Jhingan (2004:97) Investasi merupakan salah satu dari determinan terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, yang pada hakikatnya juga merupakan langkah awal bagi kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi akan menambah sumber daya produktif suatu negara . Investasi juga sering merupakan satu-satunya cara bagi teknologi baru yang produktif untuk meningkatkan kinerja ekonomi karena investasi harus dibiayai oleh tabungan suatu negara. Melalui efeknya, pada investasi dapat menimbulkan pengaruh penting pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sukirno (2002:39) investasi adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Investasi ini memiliki 3(tiga) peran :

- a) Merupakan salah satu komponen pengeluaran agregat, dimana peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional.
- b) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dimasa depan dan perkembangan ini menstimulir pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja.
- c) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, sehingga akan memberikan kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

Menurut Samuelson (2004:203) dalam istilah makro ekonomi, investasi diartikan sebagai peningkatan barang modal berwujud dalam masyarakat baik peralatan, gedung dan persediaan. Investasi hanya terjadi apabila ada tambahan barang modal.

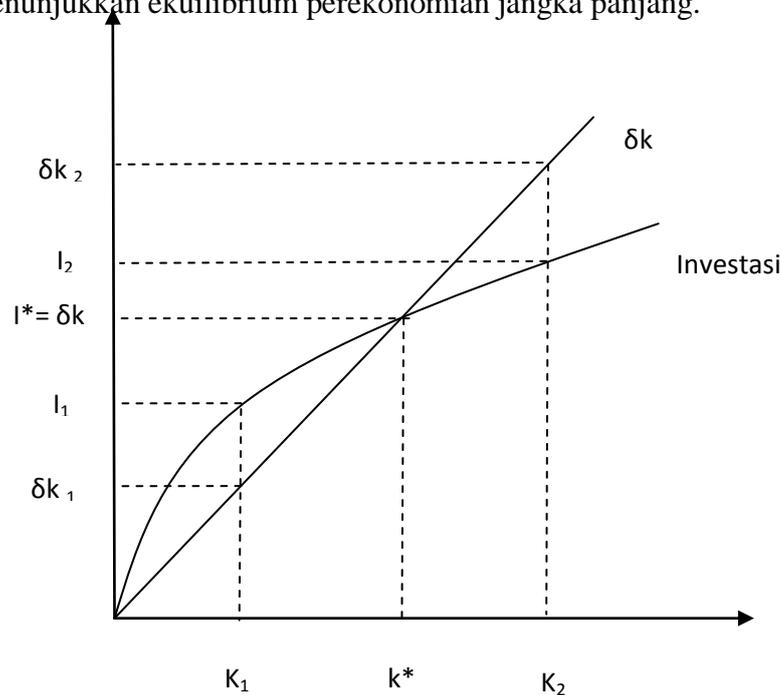
Jadi, investasi merupakan langkah awal bagi setiap negara atau daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Todaro (2006:177) akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Investasi dapat menambah persediaan modal sedangkan yang mengurangi persediaan modal adalah penggunaan dan penyusutan nilai modal itu sendiri yang disebut depresiasi, dampak investasi dan depresiasi terhadap persediaan modal dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

Perubahan persediaan Modal= Investasi – Depresiasi.....(2.1)

$$\Delta k = i - \delta k \dots \dots \dots (2.2)$$

Selain mengasumsikan fungsi produksi yang memiliki skala pengembalian konstan dan menggambarkan produk marjinal modal yang kian menurun, Solow (mankiw 2007:85) juga menyatakan perekonomian suatu negara akan selalu berakhir pada kondisi mapan (*steady state*) dimana persediaan modal tidak akan tumbuh dan menyusut karena keseimbangan antara investasi dan depresiasi yang menunjukkan ekuilibrium perekonomian jangka panjang.



Sumber : Mankiw 2007

Gambar 2.2. Kurva Keseimbangan Investasi Dan Depresiasi

Gambar 2.2 menjelaskan hubungan investasi depresiasi dan kondisi mapan. Tingkat modal kondisi mapan (k^*) adalah tingkat dimana investasi sama dengan depresiasi yang menunjukkan bahwa jumlah nodal tidak akan berubah sepanjang waktu. Perekonomian

selalu berakhir pada kondisi mapan (k^*) hal ini disebabkan karena 1) apabila tingkat modal lebih kecil dari tingkat modal kondisi mapan seperti tingkat k_1 artinya tingkat investasi melebihi dari jumlah depresiasi. Sepanjang waktu, persediaan modal akan naik dan akan terus naik bersamaan dengan output hingga mendekati kondisi mapan (k^*) 2) demikian pula apabila tingkat modal lebih besar dari pada tingkat kondisi mapan yaitu tingkat k_2 mengindikasikan bahwa investasi lebih kecil dari pada depresiasi sehingga modal akan habis dipakai lebih cepat ketimbang pengantiannya. Persediaan modal akan turun, yang sekali lagi akan mendekati tingkat kondisi mapan. Sekali persediaan modal mencapai kondisi mapan investasi sama dengan depresiasi dan tidak ada tekanan terhadap persediaan modal naik atau turun.

Jika melihat gambar 2.2 menggambarkan dimana disatu sisi keseimbangan antara investasi dan depresiasi dalam persediaan modal mengakibatkan perekonomian berada pada kondisi mapan k^* , namun disisi lain tingkat output menjadi konstan sehingga perekonomian menjadi tidak tumbuh. Untuk melihat bagaimana perekonomian bisa tumbuh dengan tingkat modal dan output yang lebih tinggi, Solow memperlihatkan dalam bentuk tingkat tabungan yang lebih tinggi.

Maka dapat diketahui bahwa dalam model solow, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh jumlah modal yang digunakan dan jumlah per pekerja yang akan digunakan. Apabila modal yang digunakan

mengalami peningkatan, maka tenaga kerja yang digunakan akan mengalami penurunan dikarenakan penambahan pada penggunaan teknologi.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh perkembangan investasi. Bila investasi meningkat, output meningkat, pendapatan meningkat dan pengangguran berkurang. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan perhatian terhadap investasi melalui kebijakannya baik dari fiskal maupun moneter.

b. Investasi Pemerintah (Belanja Pembangunan/modal)

Investasi pemerintah yang dilakukan pemerintah melalui belanja pembangunan/belanja modalnya memerlukan kebijakan pemerintah itu sendiri. Pemerintah mengatur sedemikian rupa kebijakan anggaran pengeluaran (rutin dan pembangunan) agar menunjang laju perekonomian.

Menurut Nordiawan (2006:63) Belanja modal yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu, belanja modal yang dimaksud untuk mendapatkan asset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, pembangunan, dan infrastruktur dan yang lainnya.

Menurut Halim (2008:5) Belanja modal yang didefinisikan sebagai belanja/biaya pengeluaran yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Belanja modal atau investasi adalah pengeluaran yang manfaat cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset

atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin biaya operasional dan pemeliharaan. Pengeluaran ini dilakukan pemda untuk melaksanakan wewenang dan atastanggung jawab nya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (pemerintah propinsi/pemerintah pusat).

Menurut Halim (2004:72) Belanja modal atau investasi adalah pengeluaran yang manfaat cendrung melebihi satu anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya dan pemeliharaan. Pengeluaran ini dilakukan oleh pemda untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab nya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (pemerintah propinsi/pemerintah pusat).

Jadi investasi pemerintah merupakan bagian dari kebijakan pengeluaran pemerintah, dimana anggaran kinerja belanja yang dimiliki oleh pemerintah dibelanjakan untuk keperluan pembangunan (investasi) terhadap kepentingan masyarakat atau kepentingan publik. Investasi pemerintah ini berfungsi untuk mendorong dan perkembangan dunia usaha selain itu juga stabilitas kegiatan ekonomi.

c. Investasi swasta (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal dan perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam

perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri. Investasi menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka *output* potensial suatu negara akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat.

Menurut Nurkse dalam (Jhingan; 2010: 338), lingkaran setan kemiskinan di negara terbelakang dapat digunting melalui pembentukan modal. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendapatan di negara terbelakang maka permintaan, produksi, dan investasi menjadi berada pada tingkatan yang rendah. Hal ini menyebabkan kekurangan barang modal yang dapat diatasi melalui pembentukan modal.

Menurut Rizky (2016) Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri yang disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dapat disimpulkan bahwa pembentukan modal dalam arti investasi sangat mempengaruhi pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya negara terbelakang dan negara berkembang yang kekurangan modal fisik untuk melakukan pembangunan.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian	Judul	Variabel	Model	Hasil
Anggarini (2017)	Analisi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, Kesehatan, Pertanian, PDB	Teknik analisis data menggunakan analisis data time series dengan model ECM (Error Correction Model)	Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap PDB dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian secara simultan berpengaruh baik terhadap PDB dalam jangka pandang maupun jangka pendek
Alexiou (2009)	Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE)	Pengeluaran Pemerintah, PDB	Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	Hasil dari Penelitian ini adalah belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Ekonomi.
Aminah (2016)	Analisis Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Provinsi Jambi	Investasi Swasta, Pengeluaran Pemerintah, PDRB, kemiskinan	Metode dalam penelitian ini adalah OLS	Investasi swasta dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Artinya kedua variabel independen ini dapat dijadikan instrument untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi meskipun masih banyak variabel lain yang

				juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Bastias (2010)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1996-2009	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang perumahan	Model analisis yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM)	Hasil regresi dengan ECM menunjukkan bahwa dalam jangka pendek hanya variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, dan perumahan tidak signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Eggoh dkk (2015)	Education, Health And Economic Growth In African Countries	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, PDB	Data yang digunakan data panel, model FEM	Pengeluaran publik untuk pendidikan, kesehatan memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan indikator persediaan modal manusia memiliki sedikit efek positif. Selanjutnya menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan dan kesehatan saling melengkapi. Kemudian investasi publik di bidang pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan.
Novsilvana dan Khusaini (2017)	Analisis Pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja infrastruktur	Belanja Pendidikan, kesehatan, infrastruktur,	Metode yang digunakan adalah metode Regresi Linier	Bahwa belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memiliki pengaruh signifikan dan

	dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2014	investasi swasta, PDRB	Berganda	positif. Untuk variabel investasi swasta berpengaruh signifikan positif dan memiliki pengaruh yang paling besar diantara variabel lainnya.
Oktavianingrum (2016)	Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan di Yogyakarta: studi 5 Kabupaten Kota			bahwa jumlah investasi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan pembentukan modal yang dapat meningkatkan perekonomian di suatu wilayah. Selanjutnya jumlah angkatan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah akan menyebabkan kualitas yang dimiliki penduduk akan semakin baik
Riski dkk (2016)	Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri	PMA, PMDN, Belanja modal Pemerintah, PDRB	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial penanaman modal asing berpengaruh

	Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia		adalah analisis regresi berganda	<p>positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tahun 2010-2013.</p> <p>Hasil lain dalam penelitian bahwa secara parsial penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tahun 2010-2013.</p> <p>Berkaitan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, diperoleh hasil bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tahun 2010-2013.</p>
Sulistiawati (2010)	Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia	Investasi, PDB, Penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat	Metode yang digunakan adalah Teknik analisi Jalur (Path Analisis)	Investasi berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan investasi menyebabkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi di provinsi di Indonesia. Investasi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap

				<p>penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia. Hasil ini memberikan dukungan</p> <p>terhadap hipotesis dua yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia. Kenaikan investasi akan diikuti dengan kenaikan pada penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia.</p>
Winarti (2014)	<p>Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 1992-2012</p>	<p>Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, kesehatan, Kemiskinan, PDB,</p>	<p>Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana atau <i>Ordinary Least Squares</i> (OLS)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, maka menurunnya tingkat kemiskinan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, yang berarti PDB meningkat maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat. Sedangkan variabel anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan</p>

				Manusia di Indonesia
--	--	--	--	----------------------

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan permasalahan. Keterkaitan maupun hubungan antara variabel yang diteliti diuraikan dengan berpijak dari teori yang dikemukakan di atas.

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang tersusun adalah bahwa PDRB dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pendidikan, dan investasi. Variabel tersebut termasuk variabel independen dan bersama-sama dengan PDRB sebagai variabel dependen akan diukur dengan alat analisis regresi untuk memperoleh tingkat signifikansinya.

Pengaruh pendidikan terhadap PDRB adalah semakin tinggi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan regional di suatu daerah, hal ini di mungkinkan karena pendidikan menyokong secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sangat efisien untuk meningkatkan keahlian dan kualitas manusia sehingga produktivitas manusia dalam bekerja akan mengalami peningkatan, hal ini akan berdampak kepada meningkatnya PDRB di suatu daerah.

Semakin tinggi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan maka akan berpengaruh kepada meningkatnya jumlah murid yang mampu

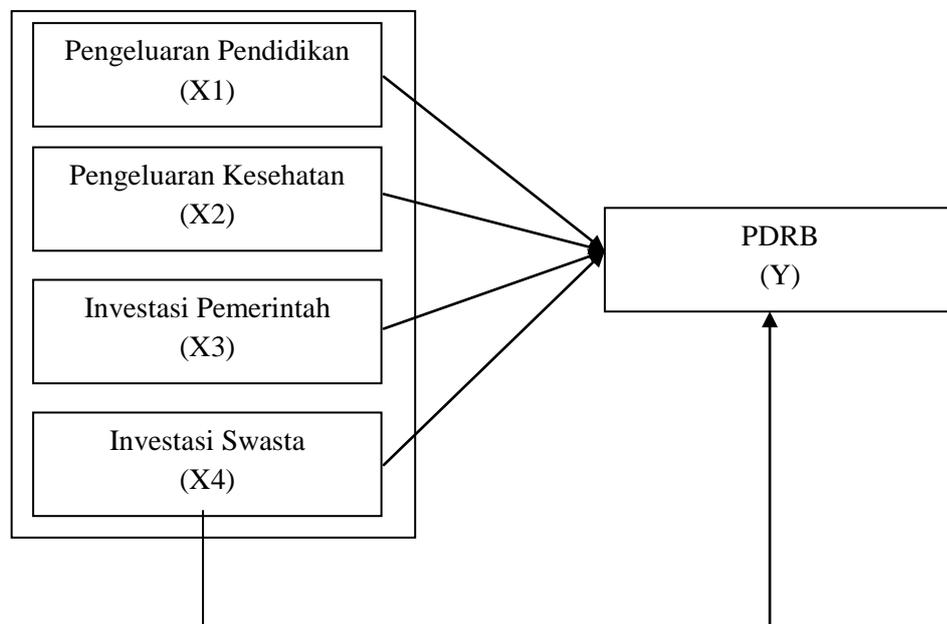
menyelesaikan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi, dimana apabila semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan akan mampu melahirkan lulusan yang bermutu, produktifitas akan dapat dipacu dan akan diikuti oleh peningkatan pendapatan perkapita. Dengan tenaga kerja yang bermutu serta produktif akan membuka peluang besar bagi tenaga kerja untuk masuk kepasar tenaga kerja dan mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dengan banyaknya tenaga kerja yang bekerja akan mempengaruhi jumlah pendapatan di Indonesia sehingga pendapatan yang tinggi akan mendorong laju pertumbuhan PDRB kearah yang lebih baik.

Pengaruh Investasi terhadap PDRB adalah semakin besar investasi maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan domestik regional bruto suatu daerah. Hal ini di mungkinkan karena jika investasi di tingkatkan maka akan memberikan dampak terhadap peningkatan PDRB.

Investasi berpengaruh positif terhadap PDRB, dimana apabila investasi meningkat akan meningkatkan proses produksi baik produksi barang maupun jasa di Indonesia. Dengan meningkatnya proses produksi akan membuka peluang besar bagi tenaga kerja yang belum bekerja, meningkatnya kesempatan akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja di Indonesia. Dengan peningkatan permintaan tenaga kerja Indonesia akan mendorong kenaikan pendapatan tenaga kerja. Dengan peningkatan pendapatan yang di alami oleh Indonesia akan mendorong pertumbuhan PDRB lebih tinggi dan lebih baik dari sebelumnya.

Pengaruh kesehatan terhadap PDRB adalah semakin tinggi pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan regional suatu daerah. Hal ini di mungkinkan karena jika investasi terhadap kesehatan di tingkatkan maka akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jadi secara bersama-sama pendidikan, kesehatan dan investasi berpengaruh positif terhadap PDRB di Indonesia. Agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis memberikan gambaran dalam bentuk bagan berikut :



Gambar 2.3
Kerangka Konseptual Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori, dan penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh signifikan antara pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Terdapat pengaruh signifikan antara pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Terdapat pengaruh signifikan antara investasi pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Terdapat pengaruh signifikan antara investasi swasta terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia.

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

5. Terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pendidikan , tingkat kesehatan, investasi pemerintah dan swasta secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari hasil penelitian data dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan Tingkat Pendidikan terhadap pendapatan domestik regional bruto di Indonesia . Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan meningkatkan proses pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Indonesia sehingga akan meningkatkan PDRB Provinsi-provinsi di Indonesia kearah yang lebih baik.

Investasi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Indonesia . Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar investasi pemerinta akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan mendorong proses produksi barang dan jasa lebih cepat sehingga akan meningkatkan pendapatan domestik regional bruto kearah yang lebih baik.

Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Indonesia . Hal ini menjelaskan semakin tinggi investasi swasta akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan mendorong proses produksi barang dan jasa lebih cepat sehingga akan meningkatkan PDRB kearah yang lebih baik.

B. SARAN

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari hasil penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan mempengaruhi PDRB provinsi-provinsi di Indonesia dimana semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan maka semakin besar pula sumbangan yang diberikan terhadap PDRB provinsi-provinsi di Indonesia, untuk itu disarankan kepada pemerintah :
 - a. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas dan dapat menciptakan efisiensi biaya agar dapat terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
 - b. Meningkatkan fasilitas pendidikan terutama di daerah pedesaan dan daerah yang tingkat pendidikannya masih rendah.
 - c. Memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan siswa yang kurang mampu namun memiliki prestasi yang bagus di sekolah.
2. Investasi pemerintah mempengaruhi PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia, untuk itu disarankan kepada pemerintah :
 - a. lebih meningkatkan kegiatan investasi pemerintah terutama pelayanan publik seperti pengadaan infrastruktur jalan, jaringan, kesehatan dan transportasi agar dapat mendorong kelancaran usaha swasta serta kualitas sumber daya manusia.

3. Investasi Swasta mempengaruhi PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia, untuk itu disarankan kepada Pemerintah :
 - a. Pemerintah harus memperhatikan persoalan umum berupa keamanan dan kepastian hukum dalam negeri. Dengan adanya kepastian hukum dan keamanan maka para investor akan berminat berinvestasi di Indonesia. Kegiatan investai ini merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Sehingga apabila kegiatan investasi ini dapat berjalan lancar maka dapat mendorong peningkatan pada nilai PDRB provinsi-provinsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, 2017, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015*
- Alexiou. 2009. Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the south Eastern Europe (SEE). *Journal od Economic and Sosial Research* 11 (1) 2009: 1-16
- Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia 2006-2015.
- Bastian. 2010. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*
- Direktoral Jendral Pajak. 2006-2015. APBD. Klasifikasi Fungsi.
- Eggoh, Jude dkk. 2015. *Education, Health and Economic Growth In africa Countries*. Afrika. *Journal: Economic Development*. Erlangga: Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar, 2003, *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain,
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2008. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. Jakarta: Erlangga.
- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jhingan. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, *Reformasi, Perencanaan, strategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Loizides, E. F ., And Vamvoukas, G., 2005. “Government Expenditure And Economic Growth: Evidence From Trivariate Causality Testing”. *Journal of Applied Economics*, Vol VIII, No. 1, pp. 125-152
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi. Edisi Kelima*. Penerbit: Erlangga